



## Coordination of Actors in the Implementation of Lusi Island Tourism Development in Kedungpandan Village, Jabon District, Sidoarjo Regency

### Koordinasi Aktor dalam Implementasi Pengembangan Pariwisata Pulau Lusi di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Isnaini Rodiyah\*, Lailul Mursyidah, Ahmad Riyadh U.B

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

#### ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the coordination of actors in the implementation of Lusi Island tourism development in Kedungpandan Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. Data collection techniques were conducted by interview, observation, and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis model proposed by Miles and Huberman, consisting of four components, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the coordination of actors in the implementation of Lusi Island tourism development in Kedungpan Village and Jabon District, Sidoarjo Regency was carried out by interactive dialogue communication between actors, communication via WhatsApp, and holding exhibitions. Coordination and promotion are also carried out online. Comprehensive information on the leadership in the development of Lusi Island tourism is shown by the party who scheduled the meeting, namely Pokdarwis through public relations.

**Keywords:** Coordination, Policy Implementing Actors, Tourism Development

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi aktor dalam implementasi pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi aktor dalam implementasi pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Desa Kedungpan dan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan komunikasi dialog interaktif antar aktor, komunikasi melalui whatsapp, serta mengadakan pameran. Koordinasi dan promosi juga dilakukan secara online. Informasi pimpinan yang menyeluruh dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi ditunjukkan dengan pihak yang mengagendakan pertemuan, yaitu Pokdarwis melalui humas.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Pelaku Kebijakan, Pengembangan Pariwisata

#### OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Ilmi Usrotin Choiriyah

Reviewed by:

Gede Sandiasa and Bambang  
Kusbandrijo

\*Correspondence:

Isnaini Rodiyah  
isnainirodiyah@umsida.ac.id

Published: 14 September 2022

Citation:

Rodiyah et.al (2022)  
*Coordination of Actors in the  
Implementation of Lusi Island  
Tourism Development in  
Kedungpandan Village, Jabon  
District, Sidoarjo Regency.*

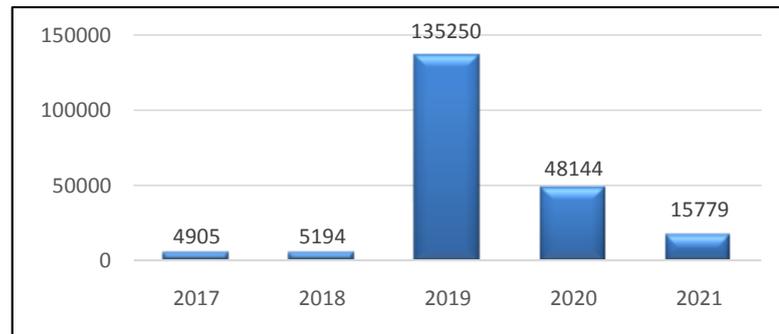
JKMP (Jurnal Kebijakan dan  
Manajemen Publik).  
10:2.

doi: 10.21070/jkmp.v10i2.1730

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak geografis yang strategis, yaitu diantara Benua Asia dan Australia serta dilintasi oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki potensi sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang melimpah. Kekayaan alam dan budaya Indonesia tersebar di setiap sudut wilayah dan dapat menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keunggulan inilah yang menjadikan Indonesia memiliki daya tarik untuk menciptakan proses pembangunan nasional melalui pariwisata. Sektor pariwisata berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah, sehingga pemerintah mulai berbenah untuk menangkap peluang tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen dalam meningkatkan kunjungan wisata berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga Pemerintah Daerah Sidoarjo menangkap peluang tersebut untuk mengembangkan wisata Pulau Lusi. Pulau Lusi mempunyai daya tarik tersendiri dengan karakteristik laut. Kehadiran pulau ini memberi warna baru bagi masyarakat di sekitar Sidoarjo, pemandangan yang bertetangga dengan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia yaitu Surabaya. Pulau seluas 94 hektare itu, kini menjadi destinasi wisata baru bagi wisatawan. Meski Pulau Lusi memiliki peluang karena tiket yang murah dan menjadi wisata alam unggulan Kabupaten Sidoarjo namun nampaknya masih menemukan berbagai kendala. Kunjungan wisatawan ke Pulau Lusi menurun drastis selama dua tahun terakhir akibat pandemi covid. Adapun kunjungan wisatawan ke Pulau Lusi tahun 2017-2021 sebagai berikut:



**Gambar 1. Grafik Jumlah Kunjungan Wisata di Pulau Lusi Tahun 2017-2021**

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa grafik pengunjung Pulau Lusi pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 kunjungan wisatawan Pulau Lusi mengalami penurunan yang cukup banyak dibanding tahun 2019 akibat dari pandemic covid-19. Melihat kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang serius dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Pulau Lusi agar pelaksanaan pengembangan wisata alam dapat berjalan dengan optimal, serta mencapai tujuan dan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan Kabupaten Sidoarjo.

Pembangunan di Pulau Lusi tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena kondisi tanah masih berumur 14 tahun sehingga kekuatan dari tanah endapan tersebut hanya 8-10 meter, belum layak untuk dilakukan pembangunan. Selain itu tidak adanya fasilitas penunjang seperti fasilitas Kesehatan dan fasilitas komunikasi. Fasilitas kesehatan berupa polindes berjarak sekitar 3 Km dari dermaga penyeberangan ke Pulau Lusi dan hanya melayani pada hari-hari tertentu. Fasilitas komunikasi berupa sinyal telepon di objek Pulau Lusi tergolong lemah. Kendala juga dialami dalam komunikasi, Pemerintah Desa Kedungpandan sering menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar berkenan membantu dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlocor dan Pulau Lusi, namun kurang mendapatkan perhatian.

Permasalahan terkait pengembangan pariwisata Pulau Lusi seharusnya bisa dicegah dengan adanya koordinasi antar aktor yang terlibat untuk pencapaian yang sangat memuaskan. Dengan koordinasi yang baik sebagai proses penyepakatan bersama sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan koordinasi aktor dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yang diambil berada di Kabupaten Sidoarjo dengan situs penelitian di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti berdasarkan indikator koordinasi dan prinsip fungsionalisasi menurut Handyaningrat yaitu (1) komunikasi, (2) kesadaran pentingnya koordinasi, (3) kontinuitas perencanaan, (4) kompetensi partisipan, (5) kesepakatan, (6) kelembagaan, (7) tata kerja yang jelas, dan (8) informasi pimpinan yang menyeluruh (Handyaningrat, 2011). Key informan dalam penelitian ini yaitu Humas Pokdarwis dan Sekretaris Desa Kedungpandan. Sumber data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komunikasi antar aktor

Komunikasi menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan karena melalui komunikasi informasi mengenai kebijakan maupun aksi-aksi dapat tersampaikan kepada semua pihak yang terlibat. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi pengembangan wisata Pulau Lusi karena melalui komunikasi yang efektif akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelaksana agar tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan. Proses komunikasi mengenai pengembangan wisata Pulau Lusi dilakukan oleh Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporpar) Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat melalui pameran dan rangkaian *city tour*. Komunikasi juga dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo (APPWS) dengan mengundang beberapa negara untuk melakukan kunjungan ke Pulau Lusi. Disini terlihat bahwa Disporpar dan APPWS sama-sama memasarkan Pulau Lusi dengan cara pameran, namun pemasaran yang dilakukan APPWS lebih meluas. Sedangkan komunikasi diantara para pelaksana yang terlibat yaitu melalui rapat pembahasan pengembangan wisata Pulau Lusi. Pemanfaatan media elektronik *whatsapp* juga digunakan untuk menunjang kelancaran koordinasi diantara para pelaksana. Temuan diatas sesuai dengan pernyataan Meter dan Horn dalam Winarno (2016:144) menjelaskan bahwa sangat penting untuk menyampaikan ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Gambaran dilapangan terkait manajemen pemasaran diperkuat pendapat dari Kotler dan Keller yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran destinasi pariwisata adalah segala aktivitas destinasi pariwisata dalam memilih sasaran, mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan terpilih dengan cara menyampaikan dan mengkomunikasikan segala penawaran yang dapat memuaskan pelanggan (Koyler & Keller, 2016).

Komunikasi juga dilakukan dengan pertemuan tatap muka diantara para aktor kebijakan secara langsung dan interaktif dalam rangka membahas kepentingan atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya proses ini diharapkan dapat meningkatkan rasa hormat antar aktor dan menghilangkan pikiran negatif antar aktor. Dengan komunikasi yang dilakukan secara langsung maka diharapkan aktor yang terlibat menjadi lebih objektif dalam melakukan interaksi. Pertemuan tatap muka yang terjadi diantara Pokdarwis, Pemerintah Desa Kedungpandan, dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo (APPWS) sangat

intens pada awal pelaksanaan. Namun Pemerintah Desa Kedungpandan jarang mengikuti pertemuan tersebut sehingga mempengaruhi kepercayaan Pokdarwis. Sedangkan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata belum terlibat dalam pertemuan pembahasan pengembangan wisata Pulau Lusi. Temuan ini tidak sesuai dengan Pedoman Kelompok Sadar Wisata bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota melakukan pembinaan langsung terhadap pokdarwis. Sedangkan dengan APPWS sudah terjadi pertemuan sejak Pokdarwis belum terbentuk. APPWS berkunjung setiap minggu untuk melakukan bimbingan. Hal ini sesuai dengan teori Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat, 1994) melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan. Hasil penelitian ini juga terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar menyatakan bahwa ketidakhadiran beberapa aktor dalam pertemuan atau rapat mengakibatkan terhambatnya pengembangan (Umar, 2019).

## **Kesadaran pentingnya koordinasi antar aktor**

Kesadaran pentingnya koordinasi merupakan modal awal bagi perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana terdapat konsultasi bersama. Terbangunnya kesadaran pentingnya koordinasi agar dapat membagi informasi dan membuat kesepakatan yang telah di tentukan bersama Handayaningrat. Kesadaran pentingnya koordinasi dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi dimulai dengan masyarakat setempat melalui organisasi Pokdarwis meminta ijin kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan wisata dengan permodalan secara mandiri. Hal ini karena Pulau Lusi berada dalam pengelolaan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan di wilayah daratan Tlocor yang merupakan lokasi dermaga penyeberangan menuju Pulau Lusi. Tetapi Pemerintah Daerah belum memfasilitasi masyarakat di wilayah Tlocor yang berkeinginan untuk melakukan pengembangan wisata. Pemerintah Daerah berdalih karena tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mengembangkan Pulau Lusi, namun juga tidak ada upaya untuk mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat. Pokdarwis terbentuk pada awal tahun 2019, namun sebelumnya sudah ada pokdarwis sejak tahun 2012 yang beranggotakan pejabat-pejabat di Pemerintah Daerah. Hal itu tidak sesuai dengan pedoman pokdarwis yang mana harus beranggotakan masyarakat setempat yang berada di sekita destinasi wisata, sehingga pokdarwis yang lama vakum dan dibubarkan. Berdasarkan temuan diatas dapat diketahui bahwa adanya kekuatan yang berbeda dapat menghambat proses koordinasi karena ketidakseimbangan akan menghasilkan kepercayaan yang rendah. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Ansel dan Gash (2007) bahwa ketidakseimbangan kewenangan antara para aktor menyebabkan lemahnya kepercayaan sehingga kolaborasi menjadi tidak efektif.

## **Kontinuitas tahapan perencanaan**

Menurut Tripathi dan Raddy (Tripathi & Reddy, 2008) koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Koordinasi yang terjadi antara Pokdarwis dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo berjalan lancar. Tetapi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disparpor) serta Pemerintah Desa belum memaksimalkan perannya. Disparpor sebagai pembina kurang menunjukkan perhatiannya dalam membimbing dan mengarahkan pokdarwis. Pemerintah Desa yang bertindak sebagai penasehat dirasa kurang memantau perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh pokdarwis karena jarang menghadiri rapat. Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan pendapat Edward III dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa fragmentasi memiliki tujuan untuk menyebarkan tanggung jawab mengenai berbagai kegiatan pada beberapa bidang yang sesuai dengan keahliannya. Untuk memperlancar penyebaran tanggung jawab pada beberapa badan yang berbeda diperlukan koordinasi yang lancar diantara para pelaksana.

## **Kompetensi partisipan dalam pelaksanaan pengembangan wisata**

Kompetensi partisipan adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam hasil keputusan bersama Handayaniingrat. Dalam implementasi pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Kabupaten Sidoarjo, kompetensi partisipan dapat dilihat dari koordinasi dan promosi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pokdarwis konsistensi dalam mempromosikan wisata Pulau Lusi melalui event-event yang diselenggarakan seperti pameran, lomba lari Lusi 10K, serta promosi di media sosial sehingga dapat meraih juara 2 Anugerah Pesona Indonesia (API) Award. Selain itu melalui promosi di instagram, facebook, youtube, dan brosur-brosur yang disebar. Pokdarwis juga mengusahakan pengembangan wisata Pulau Lusi melalui pengajuan proposal pembangunan dermaga apung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil temun dilapangan diperkuat pendapat dari DeVito (Devito, 2011) tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa bahwa komunikasi massa menekankan unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan komunikasi dan mengkaitkannya dengan operasional media massa. Diperkuat dengan penelitian Rahmawati bahwa koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan intern maupun ekstern (Rahmawati, 2014).

## **Kesepakatan antar aktor**

Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian (Handayaniingrat, 2011). Kehendak yang telah disepakati oleh para pelaksana dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi adalah agar dikenal sebagai wisata alam hingga tingkat nasional dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berkomitmen untuk memperkenalkan keindahan Pulau Lusi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti lomba lari Lusi 10K, lomba fotografi, dan lomba videografi. Pemerintah Desa membuktikan komitmennya dalam mengembangkan wisata Pulau Lusi melalui bantuan dana Bumdes yang dipinjamkan kepada Pokdarwis. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo berkomitmen dalam melakukan kunjungan ke Desa Kedungpandan dalam rangka pembinaan warga desa untuk pengembangan wisata Pulau Lusi. Pokdarwis sebagai pengelola juga berkomitmen melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan komunitas. Kondisi seperti ini sejalan dengan pendapat Luthans yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, kemauan usaha yang tinggi, dan suatu keyakinan menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2011).

## **Kelembagaan dalam pelaksanaan pengembangan wisata**

Kelembagaan dapat dilihat dari bentuk struktur organisasi penyelenggaranya. Struktur organisasi dalam implementasi pengembangan pariwisata pulau lusi terdapat penyebaran tanggung jawab dalam suatu organisasi untuk membuat penyelesaian tugas menjadi fokus. Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan wilayah pengembangan wisata Pulau Lusi di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilakukan sesuai Surat Keputusan Pengukuhan Pokdarwis. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan bertambah dengan keterlibatan pihak swasta yaitu Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berperan sebagai pembina dan promotor. Pembinaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemerintah Desa bertindak sebagai penasehat dan bertanggung jawab untuk mengawasi pokdarwis. Pemerintah Desa juga membuat regulasi tentang pungutan atau retribusi. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo berperan mendampingi pokdarwis secara sukarela memberikan pembinaan dan pelatihan tentang kepariwisataan. Pokdarwis bertugas untuk mengelola kegiatan wisata di Pulau Lusi. Pokdarwis menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang ada pada masing-masing unit kerja dan terbagi menjadi lima seksi. Temuan diatas sesuai dengan Pasal 10n Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam pembangunan kepariwisa-

taan daerah diperlukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota lainnya, institusi swasta, serta masyarakat.

### **Tata kerja yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan wisata**

Koordinasi juga membutuhkan tata kerja yang jelas untuk memudahkan tercapainya koordinasi yang sempurna dalam penerapan suatu program atau kegiatan. Tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dapat menghambat tercapainya koordinasi (Handayani, 2011). Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu manajer dalam mengawasi bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan. Dengan ada kewenangan, maka para pelaksana memiliki kekuatan yang sah dalam melaksanakan kebijakan. Kewenangan pengelolaan lahan Pulau Lusi sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata Pulau Lusi memiliki kewenangan terbatas yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor : 556/09/438.5.16/2019. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memahami tugasnya dalam melakukan promosi wisata Pulau Lusi. Pemerintah Desa juga memahami akan kewenangannya sebagai pengawas, pemberi ijin dan regulasi. Pokdarwis juga memahami kewenangannya sebagai pengelola kegiatan wisata, namun masing-masing unit kerja memiliki egosentris. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo memahami kewenangannya sebagai pihak yang membina pokdarwis secara sukarela. Berdasarkan temuan di atas dapat diketahui bahwa kewenangan sudah dimiliki masing-masing pelaksana walaupun secara terbatas, karena Pulau Lusi berada pada naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pelaksana sudah bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan pernyataan Edward III dalam (Winarno, 2016) menjelaskan bahwa kewenangan diperlukan bagi pelaksana untuk membuat keputusan pada wilayah kewenangannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

### **Informasi Pimpinan yang menyeluruh pada semua aktor yang terlibat**

Informasi pimpinan yang menyeluruh menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Kuntjoro menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada lain yang dapat menggantikannya (Kuntjoro, 2020). Informasi pimpinan yang menyeluruh dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi ditunjukkan dengan pihak yang mengagendakan pertemuan, yaitu Pokdarwis melalui humas yang selalu berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo (APPWS) dan Pemerintah Desa Kedungpandan. Temuan di atas menunjukkan bahwa terdapat kepemimpinan efektif yang mana Ketua APPWS dan Sie Humas Pokdarwis dapat menggerakkan para anggota untuk bertindak produktif dalam mengembangkan wisata Pulau Lusi. Gambaran kondisi di lapangan tersebut sejalan dengan pernyataan Maxwell menyatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif harus dapat menggerakkan orang yang dipimpinnya untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih produktif (Maxwell, 2005).

## KESIMPULAN

Koordinasi aktor dalam implementasi pengembangan pariwisata Pulau Lusi di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan promosi melalui pameran, city tour, serta pemanfaatan media elektronik *whatsapp* untuk menunjang kelancaran koordinasi diantara para pelaksana. Komunikasi juga dilakukan dengan dialog interaktif antar aktor dalam rangka membahas kepentingan atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kesadaran pentingnya dimulai dengan masyarakat setempat melalui organisasi Pokdarwis meminta ijin kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan wisata dengan permodalan secara mandiri. Hal ini karena Pulau Lusi berada dalam pengelolaan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Koordinasi yang terjadi antara Pokdarwis dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo berjalan lancar. Tetapi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disparpor) serta Pemerintah Desa belum memaksimalkan perannya. Kompetensi partisipan dapat dilihat dari koordinasi dan promosi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kehendak yang telah disepakati oleh para pelaksana dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi adalah agar dikenal sebagai wisata alam hingga tingkat nasional dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat. Kelembagaan dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014. Tata kerja yang jelas ditunjukkan dengan adanya kewenangan yang dimiliki masing-masing pelaksana walaupun secara terbatas, karena Pulau Lusi berada pada naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pelaksana sudah bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Informasi pimpinan yang menyeluruh dalam pengembangan pariwisata Pulau Lusi ditunjukkan dengan pihak yang mengagendakan pertemuan, yaitu Pokdarwis melalui humasnya.

## PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

## REFERENCES

- Devito, J. A. (2011). *Komunikasi Antar Manusia*. Karisma Publishing Group.
- Handayani, S. (2011). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV Haji Masagung.
- Koyler, P., & Keller, K. (2016). *Marketing Management 15th Edition*. Prentice Hall.
- Kuntjoro, B. T. (2020). Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Unes Law Review*, 2(4), 466–477.
- Luthans, F. (2011). *Organization Behavior: An Evidence-Based Approach*. Mc Graw-Hill.
- Maxwell, J. C. (2005). *Developing the Leaders Around You: How to Help Others Reach Their Full Potential*.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis*. Mandar Maju.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2025.
- Rahmawati, T. (2014). Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggi (SEMIPRO). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 641–647.
- Tripathi, P. C., & Reddy, P. N. (2008). *Principles of Management*. Tata MC Graw-Hill Education.
- Umar, D. (2019). Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan*, 3(1), 57–66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Media Pressindo.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Isnaini Rodiyah, Lailul Mursyidah & Ahmad Riyadh U.mar Bahlamar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.